

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini akan disajikan deskripsi mengenai sejarah upah minimum, polemik kenaikan upah minimum tahun 2013 di Indonesia, data media *SKH Bisnis Indonesia* dan Sejarah Singkat organisasi serikat pekerja Kerukunan Warga Karyawan (KWK) Bisnis Indonesia. Deskripsi mengenai sejarah upah minimum di Indonesia dan polemik kenaikan upah minimum penelitan dari berbagai buku dan berita di media massa, sedangkan deskripsi *SKH Bisnis Indonesia* dan organisasi Serikat Pekerja (SP) Kerukunan Warga Karyawan (KWK) Bisnis Indonesia disarikan melalui buku *Bisnis Indonesia: 25 Tahun Menjadi Referensi Bisnis* dan *Softcopy* PDF profil BIG MEDIA Bisnis Indonesia yang peneliti dapatkan dari Kantor Pusat Bisnis Indonesia. Berikut penjabarannya:

A. Sejarah Upah Minimum

Untuk mengetahui sejarah singkat upah minimum ini berikut penelitan dari buku *Buruh, Serikat, dan Politik, Indonesia pada 1920an-1930an* karangan Jhon Ingelson. Peneliti juga memaparkan perkembangan penetapan upah minimum yang disarikan melalui buku *Pengupahan di Indonesia* tulisan Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, yang diakses pada tanggal 9 Oktober 2015 melalui http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-10.pdf. Berikut penjelasannya:

Memasuki akhir masa Perang Dunia I, komunitas Eropa di Hindia mulai terancam dan lemah kedudukannya. Mereka khawatir Revolusi Bolshevik di Rusia akan menyebar ke Eropa Barat dan berdampak pada masa depan politik

Belanda juga. Di Hindia, kaum nasionalis semakin keras menyoarakan tuntutan reformasi politik sebagai imbalan dukungan mereka terhadap pemerintah kolonial. Dalam ini, Gubernur-Jenderal Van Limburg Stirium mengumumkan rangkaian perombakan pada November 1918 dengan tujuan menjinakkan kaum nasional melalui perjanjian “Janji November”.

Janji November itu mencakup pelibatan lebih banyak orang pribumi dalam pemerintahan di koloni, peninjauan kembali kondisi kerja orang Indonesia dan hubungan industrial, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih luas bagi buruh-buruh Indonesia. Salah satu hasil “Janji November” tersebut ialah dibentuknya komisi untuk menyelidiki kemungkinan ditetapkannya upah minimum di Jawa tahun 1919.

Hasilnya tidak memuaskan, Ketua Sindikasi Pengusaha Gula pada 1928, mengatakan tanggung jawab utama industri di koloni adalah menghasilkan laba, bukan mengurus kepentingan orang Jawa. Sindikasi Gula dengan keras menolak upah minimum dengan alasan secara ekonomi tidak realistis dalam kondisi Indonesia. Jika upah dinaikkan maka mereka akan mengurangi jam kerja, modal-modal besar akan memutuskan untuk hengkang ke tempat lain. Penetapan upah minimum tidak mungkin dilakukan, diawasi dan dijalankan. Menghadapi tantangan keras dari kepentingan tuan kebun, industri gula, asosiasi pengusaha serta para pejabat, Gubernur-Jenderal akhirnya mendiamkan rekomendasi yang diberikan.

Penetapan upah minimum secara legal menjadi tuntutan utama serikat buruh sepanjang 1920an dan 1930an. Ketika orang Indonesia menduduki kursi

mayoritas di kursi dewan-dewan kota pada tahun 1930an, beberapa dewan menetapkan kebijakan upah minimum untuk perusahaan-perusahaan di wilayah mereka. Pemimpin Fraksi Nasional di Volksraad, Husni Thamrin, terus menekan pemerintah terkait isu ini. Pada tahun 1938, pemerintah menanggapi dengan cara yang sungguh tidak maksimal, yakni mengirimkan surat edaran kepada pengusaha swasta untuk lebih memperhatikan upah buruh. Akhirnya setelah perjuangan panjang serikat buruh, salah satu aturan perburuhan pertama yang diberlakukan sesudah Indonesia merdeka adalah penetapan upah minimum

Kebijakan upah minimum akhirnya diperkenalkan awal 1970an setelah dibentuk Dewan Pengupahan Nasional (DPNN) berdasarkan Keppres No. 85 tahun 1969 dan Dewan Penelitian Pengupahan Daerah (DPPD) oleh Pemerintah Daerah. Awalnya kebijakan upah minimum ditetapkan berdasarkan biaya kebutuhan Fisik Minimum (FKM). Selama lebih dari 40 tahun sejak upah minimum diberlakukan, Indonesia tiga kali mengganti indikator kebutuhan Fisik Minimum. Pertama tahun 1965-1995 mengatur lima kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman; bahan bakar, penerangan, dan penyejuk; perumahan dan alat dapur; pakaian; dan lain-lain. Ke dua tahun 1996-2005 memperkenalkan indikator Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) terdiri atas makanan dan minuman, perumahan dan fasilitas, sandang dan aneka kebutuhan. Tahun 2003 pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan termasuk penetapan upah minimum yang juga mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Perubahan komponen KFM menjadi KHM diselaraskan dengan munculnya ketentuan upah minimum melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1997 tentang Upah Minimum Regional yang hanya berlaku selama 2 tahun. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Selanjutnya Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 1 Tahun 1999 tentang Upah Minimum yang memuat ketentuan bahwa Upah Minimum terdiri atas Upah Minimum Regional Tingkat 1 (UMR I), Upah Minimum Regional Tingkat 2 (UMR II), Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat 1 (UMSR I), dan Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat 2 (UMSR II).

UMR I dan UMR II ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor seperti berikut; kebutuhan, Indeks harga konsumen, kemampuan, perkembangan dan kelangsungan daerah, upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah, kondisi pasar kerja dan tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita. Sedangkan UMSR I dan UMSR II ditetapkan berdasarkan faktor pertimbangan di atas ditambah dengan pertimbangan kemampuan perusahaan secara sektoral. Pertimbangan sektoral ini meliputi kontribusi sektor terhadap pendapatan daerah, kemampuan penyerapan tenaga kerja, dan sifat ketenagakerjaan dari perusahaan (padat modal atau padat karya).

Ke tiga, tahun 2006- sekarang. Pemerintah menetapkan upah minimum sejak tahun 2006 berdasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) seorang pekerja lajang. Komponen penyusun KHL tersebut pertama kali diatur dalam Permenakertrans No Per- 17/Men/2005 tentang Komponen dan Pentahapan

Kebutuhan Hidup Layak. Berdasarkan peraturan tersebut, komponen KHL terdiri atas 7 kelompok kebutuhan dengan 46 komponen. Pada akhir 2011 pemerintah melalui peraturan menakertrans Nomor 13 tahun 2012 merevisi komponen KHL dari 46 menjadi 60 dalam acuan penetapan upah minimum.

B. Polemik Kenaikan Upah Minimum Tahun 2013 di Indonesia

Tahun 2012 buruh melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Selain menuntut kenaikan upah, buruh juga menuntut dihapusnya sistem *alih daya outsourcing* dan menolak pembayaran iuran jaminan kesehatan sebesar 2 persen dari gaji bulanan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) per 1 Januari 2014. Dalam konteks ini, seluruh aksi unjuk rasa buruh merupakan upaya untuk mendapatkan hidup sejahtera ditengah semakin meningkatnya laju pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Untuk diketahui, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan trilogi pembangunan yang harus dipenuhi sebagai landasan pembangunan yang diukur dengan berkembangnya produk barang dan jasa.⁵³ Hasil produksi dan konsumsi akan barang dan jasa tersebut nantinya akan berpengaruh pada standar kehidupan suatu masyarakat, yang diukur melalui pendapatan nasional. Sehingga penting bagi setiap negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Indonesia sendiri mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dari 4,5 persen di tahun 2009 menjadi 6,1 di tahun 2010 dan 6,5 persen di tahun 2011.

⁵³ Pembangunan ekonomi setidaknya memiliki tiga dimensi pokok yaitu terciptanya pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan transformasi struktural perekonomian diakses pada 29 september 2015 melalui <http://www.neraca.co.id/article/58994/peran-buruh-dan-pertumbuhan-ekonomi>

Menurut laporan IMF (*International Monetary Fund*) dan *World Bank*, pendapatan nasional bruto Indonesia yang berkisar 1.318 dollar AS telah meningkat menjadi 2.007 di tahun 1990, 2.2478 di tahun 2000, 3.544 dollar di 2010 dan 3.565 dollar AS di tahun 2012. Dalam studi ekonomi politik, angka 3.000 dollar merupakan batas psikologis dimana seseorang tidak lagi memikirkan keperluan perut semata.⁵⁴ Secara bersamaan, sejak tahun 2010 kondisi ekonomi global dunia mengalami penurunan bahkan bisa dikatakan krisis, terutama di Amerika dan Eropa.⁵⁵

Kinerja ekonomi yang positif, ternyata tidak secara otomatis ikut memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Jurang antara si kaya dan si miskin kian timpang, hal ini tercermin dari terus turunnya porsi pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah dari 18,25 persen tahun 2010 menjadi 16,96 persen tahun 2011 dan 15,67 persen tahun 2012.⁵⁶ Dengan demikian Indonesia belum berhasil sepenuhnya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, kaum buruh menuntut pemerataan pendapatan. Para buruh turun ke jalan-jalan dan pusat-pusat pemerintahan di berbagai kota-kota besar untuk menuntut kesejahteraan.

Selama ini, konsumsi domestik menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi. Mulai tahun 2013 bergeser ke investasi. Dari hasil survey daya saing ASEAN yang dilakukan Lee Kuan Yew School of Public Policy dan National University of Singapore selama 2011-2012 menyebutkan bahwa Indonesia paling

⁵⁴ Wisnu, Dinna. 2012. *Politik Sistem Jaminan Sosial: Menciptakan Rasa Aman dalam Ekonomi Pasar*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka. Hal 2.

⁵⁵ Risiko-risiko terhadap perekonomian global seperti, lambatnya kemajuan dalam penyelesaian krisis Zona Euro, permasalahan utang dan fiskal di Amerika Serikat, kemungkinan terjadinya perlambatan investasi di China, dan serta gangguan pada pasokan minyak global.

⁵⁶ Wisnu, op. cit., hal 2

diminati investor. Dari skala daya tarik investasi 0-10, Indonesia mendapatkan nilai 6,89 atau tertinggi dibandingkan dengan sembilan negara ASEAN lainnya. Setelah Indonesia, menyusul Vietnam, Singapura, Thailand, dan Malaysia.⁵⁷

Secara sederhana dapat dikatakan ditengah arus globalisasi ekonomi Indonesia yang positif, buruh juga berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Selain itu, buruh adalah kunci pertumbuhan ekonomi karena dapat menggenjot tingkat produksi, tingkat konsumsi dan tingkat pendapatan. Untuk diketahui, upah buruh Indonesia Rp 3.700 per jam lebih rendah dibanding upah buruh di Vietnam sekitar Rp 8.000 dan China Rp 7.000 per jam.⁵⁸

Sayangnya, di saat buruh turun ke jalan menuntut kesejahteraan para pengusaha khawatir akan biaya produksi tinggi, padahal biaya upah buruh hanya sekitar lima persen dari total biaya produksi. Sedangkan pemerintah khawatir akan situasi perekonomian, terutama pada investasi. Maka, terjadilah konflik yang berkepanjangan antara buruh, pengusaha dan pemerintah dalam menentukan besaran upah minimum tahun 2013.⁵⁹

Tabel.2.1 Sejumlah Aksi demo buruh Tahun 2013

Tanggal	Lokasi	Tuntutan
19 Januari	KBN Cilincing, Jakarta Utara	Koreksi upah minimum sektoral provinsi dari 5 % menjadi 20%
12 Juli	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Meminta pemerintah merevisi peraturan Menakertrans No.12/2004 tentang komponen kehidupan layak dan menaikkan upah

⁵⁷Indrian, Agni, *Artikel Kekayaan Negara: Investasi di Indonesia*. Widya Madya Pusdiklat KNPk di akses pada tanggal 10 Oktober 2015 pada melalui http://www.bppk.depkeu.go.id/webpkn/attachments/791_5-Investasi%20di%20Indonesia%20-%20Agni%20-%20Edited%20by%20Tanda%20-%20EDIT%20OK.pdf

⁵⁸SKH Bisnis Indonesia, edisi 7 November 2012

⁵⁹<http://bisnis.liputan6.com/read/482927/ini-dia-daftar-ump-2013-di-33-provinsi> diakses 29 September 2015

27 September	Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kawasan Industri Jakarta, Kawasan Industri Manis, Kawasan Palembang Manis, dan Kali Sabi	Menuntut kenaikan upah minimum
3 Oktober	Kantor DPRD Cilegon, Kawasan Industri Pulogadung, empat kawasan industri Tangerang, tujuh kawasan Industri di Bekasi	Menuntut penghapusan upah murah
2 November	Balaikota DKI Jakarta	Menaikkan UMP DKI Jakarta
20 November	Bundara HI dan Istana Negara	Menuntut kenaikan upah minimum
22 November	Kantor MPR/DPR RI, Istana Negara dan Bundaran HI	Menuntut kenaikan upah minimum

Sumber: disarikan dari berbagai situs berita online dan *SKH Kompas* edisi 3 November 2012

Buruh giat melakukan aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah dan mengawasi proses berjalannya sistem penghitungan besaran upah minimum. Mulai dari penentuan komponen dan nilai kebutuhan hidup layak hingga keputusan besaran jumlah besaran upah minimum yang dikeluarkan masing-masing Gubernur di Indonesia. Pengusaha kecewa akan keputusan pemerintah yang mengeluarkan Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi (mennakertras) sesuai peraturan Mennakertrans No. 17/2005 menambah jumlah komponen kebutuhan hidup layak dari 46 menjadi 60 komponen. Namun buruh tetap berdemonstrasi menuntut KHL ditambah 86-120 butir.⁶⁰

Setiap kali pemerintah berdialog dengan dewan pengupahan, serikat pekerja buruh, terutama di kawasan industri di Jabodetabek berkoordinasi melakukan aksi unjuk rasa yang merupakan suatu bentuk tekanan bagi pemerintah. Bahkan pengusaha juga sempat melaporkan aksi unjuk rasa buruh di

⁶⁰ Lihat *SKH Kompas* edisi Sabtu, 4 Agustus 2012

Bekasi yang dinilai anarkis dan mengganggu kepada Menteri Perindustrian Muhammad S Hidayat dan TNI. Selain itu, pengusaha mengajukan polemik kenaikan upah minimum ke pengadilan karena keberatan akan jumlah besaran upah minimum. Buruh tidak berhenti turun ke jalan. Akibatnya pengusaha juga mengancam akan menutup usaha, merekolasi hingga memutuskan hubungan kerja (PHK) dan menutup sejumlah pabrik. Pengusaha juga secara terang-terangan mengatakan kepada media bahwa pemerintah berpihak pada buruh, dewan pengupahan dari pihak pengusaha tidak diundang dalam dialog tripartit pembahasan upah minimum. Akhirnya dialog tripartit dan bipartit dilakukan terus menerus demi mencapai besaran upah minimum tahun 2013.

Di sisi lain, sempat muncul berita di media dari kepala badan koordinasi penanaman modal. Ia mengatakan investor asing tidak terlalu mempermasalahkan tuntutan buruh. Namun, mereka lebih menghawatirkan demonstrasi buruh yang anarkis karena mengganggu produksi. Akhirnya, setelah melakukan dialog panjang dengan pengusaha dan buruh, pemerintah menentukan besaran jumlah upah minimum. Pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dikatakan dapat mengajukan penangguhan pembayaran upah minimum kepada Kemerkertrans. Berikut nilai besaran upah minimum di 33 Provinsi di Indonesia:

NO	Provinsi	2012	2013	Kenaikan (persen)
1	Nagroe Aceh Darussalam	Rp 1.400.000	Rp 1.550.000	10,71
2	Papua	Rp 1.585.000	Rp 1.710.000	7,89
3	Bengkulu	Rp 930.000	Rp 1.200.000	29,03
4	Kalimantan Tengah	Rp 1.327.459	Rp 1553.127	17
5	Bangka Belitung	Rp 1.110.000	Rp 1.265.000	13,96
6	Kalimantan Selatan	Rp 1.225.000	Rp 1.337.500	9,18
7	Kalimantan Barat	Rp 900.000	Rp 1.060.000	17,78
8	Sulawesi Selatan	Rp 1.200.000	Rp 1.440.000	20

9	Kalimantan Timur	Rp 1.177.000	Rp 1.752.073	48,46
10	Sulawesi Tenggara	Rp 1.032.300	Rp 1.125.207	9
11	Kepulauan Riau	Rp 1.015.000	Rp 1.365.087	34,49
12	Bali	Rp 967.500	Rp1.181.000	22,07
13	Jambi	Rp 1.142.000	Rp 1.300.000	13,79
14	Sumatera barat	Rp 1.150.000	Rp 1.350.000	17,39
15	Banten	Rp 1.042.000	Rp 1.170.000	12,28
16	Sumatera Selatan	Rp 1.195.220	Rp 1.350.000	12,95
17	Jawa Tengah	Rp 765.000	Rp 830.000	8,50
18	Nusa Tenggara Timur	Rp 925.000	Rp 1.010.000	9,19
19	Riau	Rp 1.238.400	Rp 1.400.000	13,09
20	Jogjakarta	Rp 892.660	Rp 947.114	6,10
21	DKI Jakarta	Rp 1.529.150	Rp 2.200.000	43,87
22	Jawa Barat	Rp 780.000	Rp 850.000	8,97
23	Maluku	Rp 975.000	Rp 1.275.000	30,77
24	Jawa Timur	Rp 745.000	Rp 866.250	16,28
25	Sulawesi Tengah	Rp 885.000	Rp 995.000	12,43
26	Gorontalo	Rp 837.000	Rp 1.175.000	40,30
27	Sulawesi Barat	Rp 1.127.000	Rp 1.165.000	3,37
28	Sumatera Utara	Rp 1.200.000	Rp 1.375.000	14,58
29	Sulawesi Utara	Rp 1.250.000	Rp 1.550.000	24
30	Nusa Tenggara Barat	Rp 1.000.000	Rp 1.100.000	10
31	Papua Barat	Rp 1.450.000	Rp 1.720.000	18,62
32	Maluku Utara	Rp 960.000	Rp 1.200.622	25
33	Lampung	Rp 975.00	Rp 1.150.000	17,95

C. Sejarah SKH Bisnis Indonesia

Terbitnya *Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia* berawal dari kerja sama antara Sukamdani Sahid Gitosardjono, Ciputra, dan Anthony Salim terhadap kebangkitan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia di era 1980-an. Hal ini ditandai dengan munculnya sejumlah industri, baik yang didanai melalui skema penanaman modal dalam negeri maupun investasi asing langsung (*foreign direct investment-FDI*). Dengan bangkitnya dan tumbuhnya perekonomian Indonesia pada saat itu, dunia usaha, terutama pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang (Kadin) Indonesia membutuhkan informasi bisnis dan ekonomi untuk menjalankan roda bisnis dan perekonomian.

Berdasarkan Keppres No. 49/1973, pemerintah mendudukkan Kadin Indonesia sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan (*partner in progress*). Sebelumnya, Kadin telah memiliki Majalah *Dagang dan Industri* namun dirasa belum cukup memberikan informasi bisnis dan ekonomi sebagai referensi kalangan pengusaha. Hal ini dikarenakan pengelolaan majalah internal pada umumnya cenderung asal terbit, kurang dikelola secara profesional.

Keempat tokoh tersebut merupakan pengusaha yang patut diperhitungkan di Indonesia melalui latar belakang dimiliki masing-masing, seperti: Sukamdani Sahid Gitasardjono awalnya berbisnis di bidang usaha percetakan PT Tema Baru pada 1995 di Surakarta. Kemudian, beralih dengan mendirikan Hotel Sahid Group yang tersebar di Jakarta, Bali, Yogyakarta dan lain-lain. Pria kelahiran Solo, Jawa Tengah, 14 Maret 1928 ini merupakan pemimpin umum PT Jurnalindo Aksara Grafika, penerbit *SKH Bisnis Indonesia*. Selain pengusaha perhotelan ia juga mendirikan Universitas Sahid. Sukamdani pernah menjabat sebagai Ketua Kadin selama 1982 hingga 1985. Di bawah pimpinannya, Kadin mampu menjalin hubungan dagang langsung dengan RRC.

Salim Group adalah konglomerat milik Taipan Sudono Salim (terlahir Liem Sioe Liong) yang pada waktu itu menguasai sedikitnya 400 perusahaan. Kantor perwakilannya di luar negeri antara lain Jepang, Filipina, Singapura, dan lainnya. Dalam hal ini Subronto Laras dipercaya mewakili Salim Group atas nama Anthony Salim yang bertindak sebagai *Chief Executive Officer* di Salim Group.

Subronto laras menyelesaikan SD dan SMP di Perguruan Cikini, Jakarta (1958-1961) dan SLTA Harapan kita, Jakarta (1964). Ia melanjutkan pendidikan

di Paisley Collage (Mechanical Engineering), Scotlandia (1969) dan kuliah hingga tahun 1972 di Hendon Collage (Bussines Sdministration), London. Kembali dari Inggris ia berkenalan dengan Atang Latief, Pemilik Bank Indonesia Raya dan sejumlah kasino (ketika itu). Bahkan ia menjadi orang kepercayaan Atang. Ia menjabat sebagai Direktur PT First Chemical Industry yang bergerak di bidang formula, alat-alat plastiik dan perakitan kalkulator. Empat tahun kemudian ia menjadi Dirut Suzuki, sebuah perusahaan motor mobil yang nyaris bangkrut kemudian berkembang hingga beromset ratusan milyar.

Sejak 1981 bisnisnya bertambah kuat dengan masuknya grup Liem Sioe Liong. Tahun 1984, ia menjadi Dirut PT National Motors Co dan PT Unicor Prima Motor, perakit mobil Mazda, Hino dan Sepeda motor Binter. Pada masa remaja, Subronto pernah menjadi pembalap motor bersama Tinton Soeprpto. Ia akhirnya menikah dengan Herlia Emmi Yani, Putri Almarhum Jenderal Ahmad Yani

Sementara itu, Eric Samola adalah eksekutif di PT Pembangunan Jaya, perusahaan di bidang *real estate* dan konstruksi. Eric adalah tangan kanan Ciputra. Ia pernah bekerja di Departemen Perdagangan RI tahun 1964-1966, lalu pindah ke PT Pembangunan Jaya (1974-1977), menjadi Direktur utama PT Grafiti Pers (1974), Pemimpin Umum Majalah Zaman (1979-1985), Direktur Harian Jawa Pos (1982) dan Wakil Pemimpin Umum Majalah Swasembada (1985). Direktur Utama PT Bina Media Tenggara (*The Jakarta Pos*). Selain itu Eric juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Kadin dan Ketua Departemen Koperasi dan Wiraswasta di DPP Golkar. Sebelumnya, ia mengenyam pendidikan di ALS di

Airmaidi, Minahasa, Sulawesi Utara (1950), SMP di Airmaidi (1953), SMA di Tomohon, Minahasa (1956) dan FHIK UI, Jakarta (1964) dan Sekolah Polisi Sukabumi.

Ciputra (Tjie Tjin Hoan) adalah pemilik PT Pembangunan Jaya, Metropolitan dan Ciputra Group. Ciputra memiliki sedikitnya 70 perusahaan di bidang properti, perkantoran, tempat hiburan dan pusat perbelanjaan serta Universitas Ciputra. Ciputra menyelesaikan pendidikannya di SMP dan SMA Frater Don Bosco, Manado, Sulawesi Utara, kuliah di Arsitektur ITB, Bandung. Ketika masih kuliah ia mendirikan perusahaan konsultan bersama beberapa temannya. Setelah lulus berkarier di Jaya Group, Perusahaan properti milik Pemda DKI, sebagai direksi sampai dengan usai 65 tahun dan kemudian menjabat sebagai penasehat.

Ciputra lalu berinovasi membangun pusat rekreasi pantai di Ancol, Jakarta Utara dan mendirikan Metropolitan Group bersama Sudono Salim (Liem Soe Liong), Sudwikatmoko, Djuhar Sutanto, dan Ibrahim Risjad membangun perumahan Pondok Indah dan Kota Mandiri Serpong Damai. Ciputra menjabat sebagai Direktur Utama di Jaya Group dan Presiden komisaris di Metropolitan Group. Selain itu, ia juga mendirikan perusahaan keluarga seperti Ciputra Group, Bank Ciputra dan Perusahaan Asuransi Jiwa Ciputra Allstate.

Kerja sama antara Sahid Gitosardjono, Ciputra, dan Anthony Salim menghasilkan sinergi baik. Sebagai pemimpin dari organisasi pengusaha nasional, Sukamdani diharapkan memberikan kontribusi dari aspek politis dan pemerintahan. Selain itu, posisi Sukamdani sebagai Ketua kadin pada era tersebut

merupakan kedudukan strategis karena dekat dengan pejabat pemerintah, sehingga diharapkan dapat mempermudah perizinan usaha penerbitan pers, mengingat saat itu tidak mudah bagi entitas bisnis di Indonesia untuk memperoleh hak hidup sebagai sebuah media pers.

Ciputra dan Eric Samola dinilai telah berpengalaman dalam industri pers, setelah sukses dengan Majalah *Tempo* dan *Jawa Pos*. Sedangkan Grup Salim diharapkan memberikan kontribusi dalam hal pendanaan. Maka, kongsi untuk menerbitkan surat kabar bisnis pun terbentuk, Sahid Group diwakili oleh Sukamdani dan Juliah Sukamdani, Salim Group diwakili oleh Subronto Laras, dan Jaya Group yang diwakili oleh Eric Samola FH Samola.

Untuk mempersiapkan penerbitan, Eric Samola merekrut sejumlah orang yang dikenalnya dan memiliki pengalaman di bidang jurnalistik, antara lain temannya Amir Daud (Redaktur pelaksana Majalah *Tempo*) menjadi pemimpin redaksi dan Lukman Setiawan (penanggung jawab pengembangan Majalah *Tempo*) mengelola di bagian perusahaan. Ketika Eric menjadi Direktur Utama PT Bina Media Tenggara (*The Jakarta Pos*) Eric juga memosisikan Amir Daud sebagai Redaktur Pelaksana. Kemudian mulai merekrut pegawai pada awal Agustus 1985, yang sebagian besar adalah tenaga muda yang baru saja lulus sarjana.

Sementara itu, pada era orde baru untuk memperoleh SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) berbagai persyaratan harus dipenuhi, termasuk rekomendasi dari lembaga terkait seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang secara resmi (artinya direstui oleh pemerintah dan PWI satu-satunya

organisasi jurnalis di Indonesia). Shirato Syafei, karyawan *Bisnis Indonesia* mengaku pernah *menongkrongi* Sekjen PWI Pusat Atang Ruswita (Bos *SKH Pikiran Rakyat*) selama tiga hari di rumah ataupun kantonya di Bandung namun hasilnya tetap nihil. Sukamdani lalu meminta Eric untuk mengadakan pendekatan kepada Departemen Penerangan.

Hal tersebut karena Eric merupakan bendahara Golkar dinilai lebih kenal dekat dengan Menteri Penerangan, Harmoko dibandingkan dirinya. Selain itu, Sukamdani juga mengatakan pernah mendekati Harmoko dengan keluarga Cendana, sehingga Harmoko dipercaya menjadi menteri penerangan. Upaya untuk menembus Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika Soekarno dan Menteri Penerangan, Harmoko ternyata tidak mudah. Namun, pada akhirnya usaha pendekatan mencapai hasil dan surat SIUPP berhasil didapatkan.

Maka, lahirlah koran bisnis-ekonomi yang bernama *Bisnis Indonesia* pada 14 Desember 1985. Pada 4 Desember 1985, keluar izin terbit bagi Harian *Bisnis Indonesia* berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No.017/SK/Menpera/SIUPP?A.7/19858. Terbitan perdana itu menandai sekaligus diakhirinya edisi uji coba, yang tercatat sebanyak 20 kali terbit.

C.1 Visi Misi dan *Tagline* Bisnis Indonesia

Mengingat *SKH Bisnis Indonesia* didirikan oleh pengusaha yang tergabung dalam Kadin. Mereka berpikir koran ini ditujukan bagi kalangan pelaku bisnis sekaligus jembatan komunikasi antara pengusaha dan pemerintah. Maka motto yang dicanangkan pun *Dari swasta, Oleh Swasta, Untuk pembangunan*”

yang dirasa relevan dengan situasi dan kondisi bangsa saat itu, yang tengah giat melaksanakan pembangunan, terutama pembangunan ekonomi.

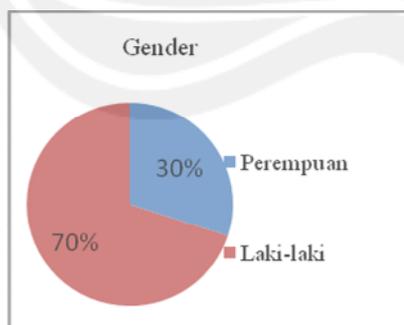
Dengan visi misi ikut berkiprah dalam pembangunan ekonomi pemerintah dengan memberi informasi bisnis dan ekonomi bermanfaat bagi dunia usaha dan membantu pemerintah dalam mempublikasikan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang perekonomian, yaitu program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Sekaligus menjadi *watch dog* agar pembangunan ekonomi berjalan diatas rel pemerintahan atau tata kelola yang baik, anti-korupsi, antimanipulasi, mendukung persaingan bisnis yang sehat dan mendorong demokratisasi.

Pada akhir 1998, sejalan dengan perkembangan situasi dan *stakeholders* motto *SKH Bisnis Indonesia* diubah menjadi *Referensi Bisnis Terpercaya*. Hal tersebut mengingat arus informasi bisnis semakin kencang, dinamika persaingan bisnis semakin menguat, termasuk perkembangan industri pers di Indonesia yang semakin bebas. Penerbit menyadari perlunya memantapkan *positioning* sebagai referensi bisnis utama, maka sajian informasi harus benar-benar cepat, lengkap akurat, serta independen, dan benar-benar dipercaya. Selain itu, visi *SKH Bisnis Indonesia* diperkuat dengan menambahkan tujuan penerbitan sebagai salah satu upaya untuk turut serta mencerdaskan bangsa, terutama dalam bidang ekonomi dan bisnis, sekaligus memantapkan misi untuk turut serta mengawal pembangunan ekonomi dan bisnis di Indonesia agar berjalan dengan tata kelola yang baik, antikorupsi, antimanipulasi, mendukung persaingan bisnis yang sehat sekaligus mendorong demokratisasi.

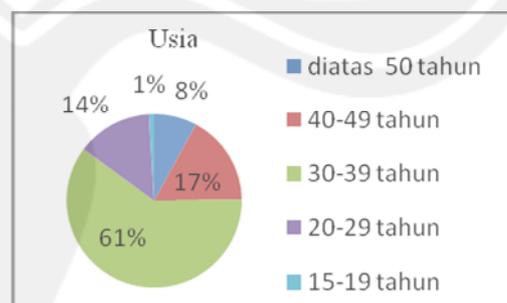
Pada akhir tahun 2012, *Bisnis Indonesia* melakukan terobosan baru dengan sikap yang lebih aktif dalam melayani pembaca yang tercermin dalam *tagline* baru *Navigasi Bisnis Terpercaya* dengan visi menjadi perusahaan media informasi atau multimedia yang terpercaya dalam rangka ikut mencerdaskan bangsa, dan misi melakukan diversifikasi usaha multimedia, memberdayakan sumber daya manusia lebih optimal (*competence base*), menjaga & mempertahankan kredibilitas usaha yang sehat (*sound business*), menghasilkan keuntungan yang wajar, memberikan manfaat bagi lingkungan dunia usaha.

C. 2 Segmentasi Pembaca Bisnis Indonesia

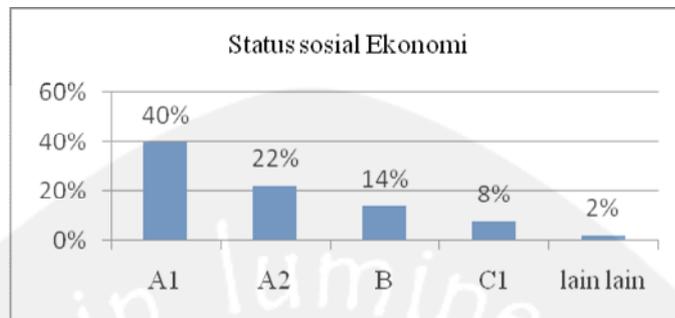
Berdasarkan riset Nielsen Index Media, *Bisnis Indonesia* dibaca oleh 121.000 pembaca dengan 97% dengan berlangganan dengan selama satu tahun mencapai 14%, berlangganan dua sampai lima tahun 37%, sekitar 30% berlangganan enam sampai 10 tahun, 10% berlangganan 11-15 tahun dan 9% pembaca sudah berlangganan 16 hingga 20 tahun. Berikut segmentasi Pembaca *SKH Bisnis Indonesia*:



Bagan 2.1 Pembaca berdasarkan Jenis Kelamin



Bagan 2.2 Pembaca berdasarkan Usia



Bagan 2.3 Berdasarkan Status Sosial Ekonomi

Berdasarkan bagan di atas menunjukkan bahwa sebagian besar (70%) pembaca *SKH Bisnis Indonesia* adalah laki-laki, berusia produktif dan berstatus sosial ekonomi tinggi.

C. 3 Perkembangan SKH Bisnis Indonesia

Awalnya, *SKH Bisnis Indonesia* terbit 12 halaman, enam kali seminggu. Lalu ditingkatkan menjadi 16 halaman, awalnya dua kali seminggu, kemudian terbit setiap hari. Jumlah halaman ditambah menjadi 24, 32 dan sekarang 36 Halaman. Berikut data singkat *SKH Bisnis Indonesia*:

Profil Media	
Bahasa	Indonesia
Edisi terbit	Harian Pagi, 7x seminggu
Jumlah Halama	36 Halaman
Dimensi per halaman	(v) 540mm x (h) 325mm
Jumlah Kolom	8 Kolom
Proses Cetak	Web Offset
Jenis Kertas	CD Newsprint 48 Gram
Halaman berwarna	Tersedia setiap hari
Harga Eceran	Rp 9.000,00/eksemplar
Harga Berlangganan	Rp 200.000,00/bulan
Homepage	www.bisnis.com
Hari Terbit	
Senin-Jumat	-Section Utama -Section Market -Section Industri
Sabtu	-Section Utama

		-Section Industri	
Edisi Minggu		- <i>Business Lifesyle</i>	
Rubrikasi 36 Halaman			
Hal	Utama	Market	Industri
1	Bisnis	Market	Industri
2	Opini	Market	IT
3	Utama	Market	Energi
4	Makro	Tabel	Agri
5	Global	Tabel	Properti
6	Lapsus*	Tabel	Transportasi & logistik
7	Infrastruktur &Lapsus	Tabel	Transportasi & logistik
8	Regional	Tabel	Niaga
9	Regional	Asuransi pembiayaan	Eunterpreneusip
10	Sport	Finansial	Komoditas
11	Hukum Bisnis	Bank	Tabel Komoditas
12	Varia	Bank	otomotif

Tabel 2.2 Data Media *SKH Bisnis Indonesia*

Seiring perkembangan, *SKH Bisnis Indonesia* berekspansi mendirikan anak perusahaan dan layanan lain yang berkaitan dengan industri informasi. Setelah dua kali berpindah Kantor *SKH Bisnis Indonesia* akhirnya berkantor pusat di Wisma Bisnis Indonesia di Jln. KH Mas Mansyur NO.12A, Karet-Tengsin, Jakarta Pusat. Hingga kini *SKH Bisnis Indonesia* memiliki 11 kantor perwakilan diantaranya Medan, Pekanbaru, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, Denpasar, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Berikut ekspansi Bisnis Indonesia lainnya:

Solopos Group (*SKH Harian Jogja, SKH Solopos, Radio Star Jogja, Radio SOLOPOS FM*, dan unit usaha dibidang event organizer *SoloPro dan Jogja Pro*), BIG Media (Bisnis.com dan Kabar24.com), TV Streaming (Bisnis TV dan Solopos TV), PT Bisnis Indonesia Gagaskreasi (Event Organizer), Penerbit Buku Gagas Bisnis dan Pustaka Bisnis Indonesia, *Bisnis Indonesia Intellegent Unit*

(BIIU, pusat analisis dan riset bisnis), *Bisnis Indonesia Learning Centre* (Bilec, pusat pengembangan pendidikan nonformal untuk pasar modal, keuangan, akuntansi), *Media Services* (pengelolaan majalah internal), *Bisnis Indonesia Sibertama* (IBIS, *Digital IT Solution*), epaper, *One Stop Shopping* (toko digital produk *Bisnis Indonesia Group*) dan Lima perusahaan percetakan di Solo, Surabaya, Makassar, dan 2 percetakan di Pulogadung, Jakarta.

Selain berekspansi, *SKH Bisnis Indonesia* juga meraih beberapa penghargaan seperti: Juara 1 Penulis Berita Ketenagakerjaan Hasil pekerja Indonesia 1996; Juara Terbaik 1 Anugera Jurnalistik, *Jakarta Fair* ke 31 tahun 1998; Juara 1 *LG Jurnalistik Award* 2003, *Most Publising Frequensy Category*; Superbrands awarded (2005-2006), *Silver Winnner, The best of News , Politics & Bussines* (Tabloid IPMA 2014, Edisi Minggu, 4 agustus 2014); *Silver Winner, The Best of Java Newspaper* (Edisi, Rabu 21 Maret 2013); *Silver Winner, The Best of Java Newspaper, IPMA 2014* (Edisi Jumat, 18 Januari 2013); *Bronze Winner, The Best of Java Newspaper, IPMA 2014* (Edisi Kamis, 10 Desember 2013); dan *Gold Winner, The Best of Java Newspaper, IPMA 2014* (Edisi Sabtu, 23 Februari 2013, Solopos).

C.4 Struktur Organisasi *SKH Bisnis Indonesia*

Penerbit	PT Jurnalindo Aksara Grafika
Direksi	Lulu Terianto (Direktur Utama), Ahmad Djuhar, Endy Subiantoro, Arif Budisusilo
Pemimpin Umum	Dr. H. Sukamdani
Wakil Pemimpin Umum	Ahmad Djuhar
Pemimpin Perusahaan	Haryadi B. Sukamdani
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab	Arif Budisusilo
Wakil Pemimpin Redaksi	Y. Bayu Widagdo
Redaktur Pelaksana	Chamdan Purwoko, M.Rochmat

	Purboyo, Setyardi Widodo,
Kepala Desk Investigasi dan Liputan Khusus	Abraham Runga Mail
Kepala Bisnis Indonesia Online	Lahyanto Nadie
Pengembangan Redaksi	Linda Tangdialla, Gung Panggodo Supryanto, M. Syahran, W. Lubis, Inria Zulfikar, Aditya Noviardi, Hery Trianto
Redaktur	Afriyanto, Aprillian Hermawan, Bastantul Siregar, Budi Prakarsa, Eries Aidin, Firman Hidranto, Firman Widodo, Gajah Kusomo, Hery Lazuardi, Ismail Fahmi, Martin Sihombing, M. Sarwani, Rahayuningsih, Rustam Agus, Sutarno, Suwartin Oemar, Zufrizal
Manajer Sekretariat Redaksi	Indyah Sutrinigrum
Asisten Redaktur	Andry T. Kurniady, Aprika Rani Hernanda, Arif Gunawan, Sulistyono, Arif Pitoyo, Bambang P.Jatmiko, Bambang Supriyanto, Fahmi Achmad, Hendra Wibawa, Lutfi Zaenudin, Maria Y. Benyamin, Moh. Fatkul Maskur, Muhammad Munir Haikal, Roni Yuniyanto, Sylviana Pravita R.K.N, Taufik Wisastra, Tomy Sasangka, Yayan Indrayana, Yeni H. Simanjuntak, Yusran Yunus,
Staff Redaksi	Achmad Aris, Agust Supriyadi, Anggi Oktarinda, Anugerah Perkasa, Asep Dadan Muhanda, Berliana Elisabeth, Bunga Dewi Kusuma, Demis Rizky Gosta, Dewi Andriani, Diena Lestari, Donald Banjarnahor, Edwina, Erwin Tambunan, Fita Indah Maulani, Gita Arwana Cakti, Gloria Natalia. D, Hendri T. Asworo, Herry Suhendra, Hilda Sabri Sulustyo, Intan Pertiwi, Irvin Avriano, Jhon A. Oktaveri, Lavinda, Linda Teti Sillitonga, Mia Cithra Dinisari, M Tahir Saleh, M. Taufikul Basari, Mulia Ginting Munthe, Nurbaiti Abdullah, Rahmayullus Saleh, Ratna Ariyanti, Reni Efitia Hendry, R. Fitriana, Rika Novayanti, Sekti Dewi Mayestika,

	Sepudin, Siti Nuraisyah Dewi, Stefanus Arief Setiaji, Yusuf Waluyo Jati
Perwakilan Bali	Samantha Ardiansyah (koordinator), Ashari Purwo Adi
Perwakilan Bandung	Hilman Hidayat (manajer), fajar Sidik
Perwakilan Makassar	M. Noor Korompot (Manajer)
Perwakilan Balikpapan	Siti Munawaroh (Koordinator), Rachad Subiyanto,
Perwakilan Medan	Melvin A. Sebayang (manajer,) Erna Sari Ulina Girsang (Asisten Redaktur), Master Sihotang
Perwakilan Semarang	Edy Barlianto (Manajer), Endot Brilliantono, Rahmat Sujianto
Perwakilan Surabaya	Galih Prakoso (Manajer), Dwi Wahyuni Darmawan
Perwakilan Malang	Bambang Sudtejo (Kordinator)
Perwakilan Batam &Pekanbaru	Suyono Saputra, (Manajer)
Perwakilan Palembang	Irsard
Asisten Manajer Layanan Sirkulasi	Indah Swarni Lestari
Pjs Pengembangan Usaha	Asep Mh. Mulyana
Asisten Manajer Pemasaran Media Digital	Nur El Fatih
Ekonom/Kepada Bisnis Indonesia intelligence Unit	Rofikoh Rokhim
Manajer Dokumentasi	Najmia Razak
Asisten Manajer Dokumentasi	Iin Sohilin
Manajer Data & Analisis	Mardianah Noerdjali
Asisten Manajer Data & Analisis	Erian Imran
Editor Buku	Rahmon Amri
Manajer BI Consultant	Super S.R.L Tobing
Analisis	Anton Hermansyah, Indra Winarni, Ratu Lela Mamdulah

Tabel 2.3. Struktur Organisasi *SKH Bisnis Indonesia*

D. Sejarah Organisasi Serikat Pekerja Kerukunan Warga Karyawan Bisnis Indonesia

Sebagai sebuah organisasi perusahaan media sudah sepatasnya memiliki organisasi serikat pekerja guna melindungi seluruh pekerja media. Terkait hal ini *SKH Bisnis Indonesia* memiliki organisasi serikat pekerja bernama Kerukunan Warga Karyawan (KWK) bisnis Indonesia. SP KWK didirikan sekitar tahun 1988

oleh Eric Samola, Lukman Setiawan, dan Syahrir Wahab. Salah satu catatan yang cukup penting dalam perjalanan sejarah SP KWK lembaga ini telah memiliki anggaran dasar yang disusun pada 1999. Masa kepengurusan ditentukan selama tiga tahun, dan boleh di pilih kembali.

Pada tahun 1990, SP KWK mengalami krisis kepemimpinan. Hal ini dikarenakan para pendiri PT JAG membagikan saham milik keluarga mantan Menpen Harmoko- atas nama Ny, Dhiyati Harmoko kepada 13 karyawan yang dinilai berjasa. Akhirnya, sempat menimbulkan gelombang protes karyawan lain yang berjumlah lebih besar sehingga dilakukan pergantian kepengurusan sebelum masa bakti mereka berakhir.

SP KWK merupakan wadah bagi karyawan untuk angkat bicara, menyampaikan gagasan konstruktif secara terbuka. Dalam perjalanannya, sepek terjang SP KWK benar-benar efektif dalam menjembatani persoalan yang muncul antara karyawan dengan manajemen, karyawan dengan karyawan, dan pengurus SP KWK dengan manajemen. Sepanjang sejarah SP KWK puluhan “kasus” yang sebagian besar perselisihan antara karyawan dan manajemen, dapat difasilitasi dan dijembatani sehingga sama-sama mencapai *happy ending*.

Memang ada satu-dua persoalan yang agak alot, baik terkait sengketa antar karyawan dengan karyawan maupun karyawan dengan perusahaan, sehingga memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Itu sebabnya, kegigihan pengurus SP KWK yang dengan penuh kesabaran dan inovasi dapat mengatasi permasalahan yang sempat di-*pending* tersebut.

Karyawan yang kedapatan melakukan pelanggaran, tentu saja sulit untuk dibantu, sehingga vonis perusahaan tak bisa dielakkan. Tetapi, setidaknya KWK tetap mengawal agar hak-hak karyawan tetap dapat diterima sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seiring dengan berjalannya waktu, peran dan posisi KWK semakin kuat dan semakin mampu menjadi solusi. Tentu tidak bisa 100% memuaskan semua karyawan, mengingat KWK mengoordinasikan 300-an karyawan.

Untuk Proses pengaduan dan penyelesaian permasalahan anggota SP KWK dengan redaksi atau manajemen Wakil Pemimpin Redaksi, Bayu Widagdo mengatakan :

Misalnya wartawan ingin gaji naiknya, merasa diperlakukan tidak adil, itu bisa melalui KWK. Nanti KWK menanyakan ke kita misalnya, ada laporan seperti ini dan menyelesaikannya bagaimana. Misalnya ada karyawan yang kena SP nih, karyawan terus mengadu ke KWK, terus KWK nanti tanya ke manajemen, kenapa orang ini diberi hukuman gitu, terus manajemen bilang, ini karyawan di kasih hukuman karena a, b, c, bla-blah, terus kalo misalnya jawaban dari mereka kurang kuat, kita bisa bilang seharusnya bisa begini dan begitu. (Wawancara langsung dengan Bayu Widagdo pada tanggal 19 Mei 2015 di Kantor Pusat SKH Bisnis Indonesia, Tengersin, Jakarta Selatan)

Sedangkan pelaksanaan program kerja SP KWK berbeda-beda, tergantung pada pengurusnya. Untuk program kerja tahun 2012 peneliti memiliki akses terbatas ke *SKH Bisnis Indonesia* sendiri. Menurut Fitriana, Wakil ketua SP KWK tahun 2013 keberadaan SP KWK:

berperan bukan pada ketentuan gaji pokok, karena itu sudah menjadi standar masuk ke Bisnis, tapi lebih banyak pada gaji tunjangan-tunjangan yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional, seperti tunjangan makan dan operasional/transportasi. (Wawancara melalui email pada tanggal 31 Agustus 2015)

Namun tetap saja penting untuk melihat bagaimana program kerja SP KWK ini. Sebagai contoh, peneliti menemukan program kerja SP KWK JAG 2012-2015 di situs <http://pekerjakwk.blogspot.co.id/> seperti berikut:

- Mempersiapkan pembahasan Pedoman Kerja sama baru dengan SDM PT JAG sebagai dari tugas utama memberla kepantingan karyawan.
- Mempertimbangan afiliasi SP KWK PT JAG ke salah satu federasi SP di Indonesia
- Melakukan pendataan terhadap karyawan
- Menyempurnakan AD/ART SP KWK yang telah ada versi 1998
- Menggelar fokus group discussiin (FGD) per 3 bulan
- Menyelenggarakan secara reguler pertemuan antara (perwakilan) karyawan dan manajemen
- Menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bisa menghasillan pemasukan dana
- Mendukung/melaksanakan berbagai kegiatan nonprofit namun dapat mempererat kekeluargaan
- Menghimpun dana iuran anggota sesuai dengan Pedoman Kerja Bersama sebesar Rp5.000 per bulan per orang